

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinnya.

Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Biro Pengadaan Barang/Jasa Semester Pertama Tahun Anggaran 2018 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut :

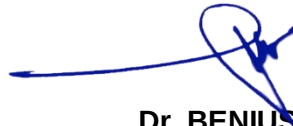
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, tidak ada realisasi pembiayaan dan realisasi pendapatan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa semester pertama Tahun Anggaran 2018, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 1.162.465.880,00 atau 30,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 3.754.000.000,00.
2. Laporan Operasional (LO) memberikan informasi tentang pendapatan, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Berdasarkan laporan ini tidak ada realisasi pendapatan, transfer, dan pos-pos luar biasa. Realisasi beban semester pertama TA. 2018 sebesar Rp. 1.652.222.609,00.
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan ini, ekuitas akhir Biro Pengadaan Barang/Jasa semester pertama TA. 2018 adalah Rp. 595.991.156,00.
4. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Biro Pengadaan Barang/Jasa per 30 Juni 2018. Dari neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah Rp.721.230.156,00, Kewajiban Rp. 125.239.000,00, dan Ekuitas Rp. 595.991.156,00.

5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksud agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang struktur organisasi, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Biro Pengadaan Barang/Jasa Semester Pertama Tahun Anggaran 2018 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Palangka Raya, 31 Juli 2018

**KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**Dr. BENIUS, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650831 199003 1 006**

DAFTAR ISI		
Kata Pengantar		
Daftar Isi		
Pernyataan Tanggung jawab		
Ringkasan		
Laporan Realisasi Anggaran		
Laporan Operasional		
Laporan Perubahan Ekuitas		
Neraca		
Catatan atas Laporan Keuangan		
Bab I	Pendahuluan	13
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan	13
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan	14
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan	15
Bab II	Biro Pengadaan Barang/Jasa, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD	18
	2.1 Biro Pengadaan Barang/Jasa	18
	2.2 Kebijakan keuangan	23
	2.3 Realisasi APBD Biro Pengadaan Barang/Jasa	26
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan	27
	3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan	27
Bab IV	Kebijakan Akuntansi	29
	4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah	29
	4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan	29
	4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan	31
	4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP	44
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan	45
	5.1 Rincian dari penjelasan setiap pos-pos laporan keuangan	45
	5.1.1 Pendapatan – LRA	45
	5.1.2 Belanja	46
	5.1.3 Pendapatan – LO	63
	5.1.4 Beban	63
	5.1.3 Aset	79
	5.1.4 Kewajiban	92
	5.1.5 Ekuitas	93
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan	95
Bab VII	Penutup	96
Daftar Lampiran		

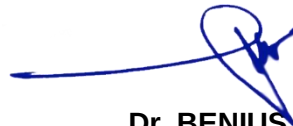
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Semester Pertama Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Operasional (LO); (c) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (d) Neraca; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester Pertama Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, 31 Juli 2018

**KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**Dr. BENIUS, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650831 199003 1 006**

RINGKASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan, sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Semester Pertama Tahun Anggaran 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

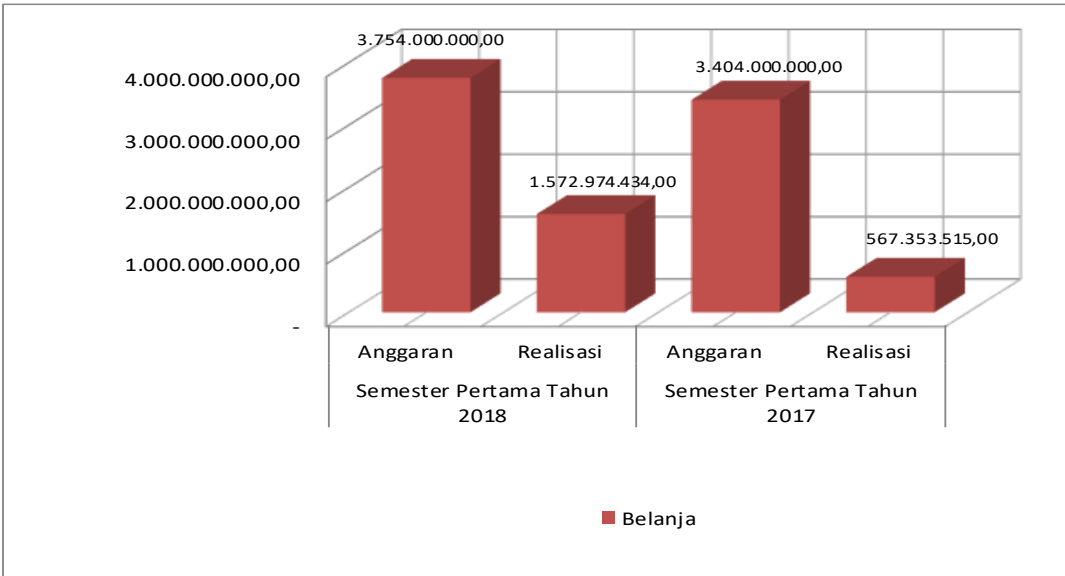
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) semester pertama Tahun 2018 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode (1 Januari s/d 30 Juni 2018).

Biro Pengadaan Barang/Jasa tidak ada realisasi pendapatan pada semester pertama Tahun Anggaran 2018. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 1.162.465.880,00 atau mencapai 30,97% dari anggarannya sebesar Rp. 3.754.000.000,00. Realisasi pendapatan semester pertama Tahun 2017 sebesar Rp. 0,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 567.353.515,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semester Pertama Tahun 2018 dan Semester Pertama Tahun 2017 dapat disajikan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018		Semester Pertama Tahun 2017	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	-	-	-	-
Belanja	3.754.000.000,00	1.572.974.434,00	3.404.000.000,00	567.353.515,00



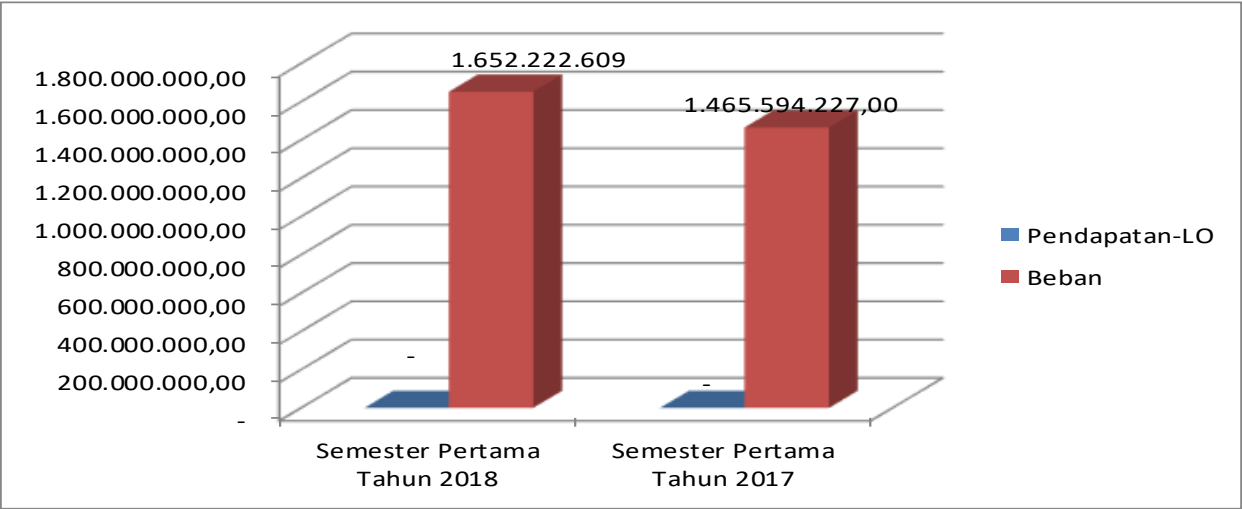
2. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional (LO) terdiri dari pendapatan – LO, beban, transfer, dan pos – pos luar biasa.

Pendapatan - LO pada semester pertama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,00 dan beban sebesar Rp. 1.652.222.609,00. Pendapatan – LO semester pertama TA. 2017 sebesar Rp. 0,00 dan beban Rp. 1.465.594.227,00. Ringkasan Laporan Operasional (LO) sampai dengan 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	30 Juni 2018	30 Juni 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Pendapatan-LO	-	-	-	-
Beban	1.652.222.609,00	1.465.594.227,00	186.628.382,00	11,30
Surplus/Defisit-LO	(1.652.222.609,00)	(1.465.594.227,00)	(186.628.382,00)	11,30



3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan disandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal berasal dari ekuitas akhir 2017 sebesar Rp. 964.747.885,00.

(dalam rupiah)

Uraian	30 Juni 2018	30 Juni 2017
Ekuitas awal	964.747.885,00	1.370.591.940,00
Surplus/Defisit - LO	(1.652.222.609,00)	(1.465.594.227,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
- Koreksi Nilai Persediaan	-	-
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
- Koreksi Ekuitas Lainnya	-	-
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	1.283.465.880,00	1.188.353.515,00
Ekuitas Akhir	595.991.156,00	1.093.351.228,00

4. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah aset per 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp. 721.230.156,00 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 4.227.446,00, aset tetap sebesar Rp. 617.179.085,00, dan aset lainnya sebesar Rp. 99.823.625,00. Sedangkan kewajiban sebesar Rp. 125.239.000,00 dan ekuitas sebesar Rp. 595.991.156,00. Ringkasan neraca per 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	30 Juni 2018	30 Juni 2017	Kenaikan / (Penurunan)
Aset			
- Aset Lancar	4.227.446,00	17.821.800,00	(13.594.354,00)
- Aset Tetap	617.179.085,00	-	617.179.085,00
- Aset Lainnya	99.823.625,00	-	99.823.625,00
Total Aset	721.230.156,00	17.821.800,00	703.408.356,00
Kewajiban	125.239.000,00	1.236.353.515,00	(1.111.114.515,00)
Ekuitas	595.991.156,00	-	595.991.156,00
Total Kewajiban dan Ekuitas	721.230.156,00	1.236.353.515,00	(515.123.359,00)

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN



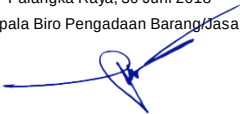
BIRO PBJ SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2017

NOMOR URUT	U R A I A N	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		REALISASI 2017 (Rp)
		ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN - LRA					
4. 1.	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD) - LRA	-	-	-	-	-
4. 1. 2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	-	-	-	-	-
4. 1. 2. 15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	-	-	-	-	-
5	BELANJA					
5. 1.	BELANJA OPERASI	3.623.950.000,00	1.162.465.880,00	(2.461.484.120,00)	32,08	567.353.515,00
5. 1. 1.	BELANJA PEGAWAI	2.407.844.000,00	899.018.500,00	(1.508.825.500,00)	37,34	301.455.000,00
5. 1. 1. 01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	-	-	-	-	-
5. 1. 1. 02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	-	-	-	-	-
5. 1. 1. 03.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	-	-
5. 1. 1. 08.	Belanja Honorarium PNS	2.161.880.000,00	797.357.500,00	(1.364.522.500,00)	36,88	204.120.000,00
5. 1. 1. 10.	Belanja Honorarium Non PNS	245.964.000,00	101.661.000,00	(144.303.000,00)	41,33	97.335.000,00
5. 1. 2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.216.106.000,00	263.447.380,00	(952.658.620,00)	21,66	265.898.515,00
5. 1. 2. 01.	Belanja Bahan Pakai Habis	182.784.100,00	43.896.350,00	(138.887.750,00)	24,02	91.505.400,00
5. 1. 2. 02.	Belanja Bahan/Material	-	-	-	-	-
5. 1. 2. 03.	Belanja Jasa Kantor	320.200.000,00	74.962.262,00	(245.237.738,00)	23,41	24.590.800,00
5. 1. 2. 04.	Belanja Premi Asuransi	-	-	-	-	-
5. 1. 2. 05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-
5. 1. 2. 06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.259.000,00	19.185.000,00	(31.074.000,00)	38,17	37.575.000,00
5. 1. 2. 07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	-	-
5. 1. 2. 08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	-	-	-	-
5. 1. 2. 10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	-	-	-	-
5. 1. 2. 11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.890.000,00	6.170.000,00	(42.720.000,00)	12,62	9.412.500,00
5. 1. 2. 12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-	-	-
5. 1. 2. 13.	Belanja Pakaian Kerja	-	-	-	-	-
5. 1. 2. 14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	-	-	-	-	-
5. 1. 2. 15.	Belanja Perjalanan Dinas	607.812.900,00	119.233.768,00	(488.579.132,00)	19,62	102.814.815,00
5. 1. 2. 18.	Belanja Pemeliharaan	-	-	-	-	-
5. 1. 2. 23.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4.360.000,00	-	(4.360.000,00)	-	-
5. 2.	BELANJA MODAL	130.050.000,00	-	(130.050.000,00)	-	-
5. 2. 2.	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	130.050.000,00	-	(130.050.000,00)	-	-
5. 2. 2. 04.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-	-	-
5. 2. 2. 05.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-	-	-
5. 2. 2. 14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	-	-	-	-	-
5. 2. 2. 15.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	-	-	-	-	-
5. 2. 2. 16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	130.050.000,00	-	(130.050.000,00)	-	-
5. 2. 2. 17.	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	-	-
5. 2. 2. 18.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	-	-	-	-	-
5. 2. 2. 19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	-	-	-	-	-
5. 2. 2. 35.	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	-	-	-	-	-
5. 2. 3.	Belanja Gedung Dan Bangunan	-	-	-	-	-
5. 2. 3. 01.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	-	-	-
5. 2. 4.	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-	-	-	-
5. 2. 4. 21.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	-	-	-	-	-
5. 2. 5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
5. 2. 5. 01.	Belanja Modal Pengadaan Buku	-	-	-	-	-
5. 2. 5. 04.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	-	-	-	-	-
	SURPLUS / DEHSIT	(3.754.000.000,00)	(1.162.465.880,00)	2.591.534.120,00	30,97	(567.353.515,00)
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	(3.754.000.000,00)	(1.162.465.880,00)	2.591.534.120,00	30,97	(567.353.515,00)

Palangka Raya, 30 Juni 2018
Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa



Dr. BENIUS, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650831 199003 1 006

LAPORAN OPERASIONAL (LO)



BIRO PBJ SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2017

NO.URUT	URAIAN	30 Juni 2018 Rp	30 Juni 2017 Rp	KENAIKAN/PENURUNAN Rp	(%)
1	2	3	4	5	6
8.	PENDAPATAN - LO				
8. 1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	-	-	-	-
8. 1. 2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	-	-	-	-
9.	BEBAN				
9. 1.	BEBAN OPERASI	1.652.222.609,00	1.465.594.227,00	186.628.382,00	11,30
9. 1. 1.	Beban Pegawai - LO	926.621.000,00	798.145.000,00	128.476.000,00	13,86
9. 1. 2.	Beban Barang dan Jasa	477.856.434,00	419.315.402,00	58.541.032,00	12,25
9. 1. 3.	Beban Bunga	-	-	-	-
9. 1. 4.	Beban Subsidi	-	-	-	-
9. 1. 5.	Beban Hibah	-	-	-	-
9. 1. 6.	Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
9. 1. 7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	247.745.175,00	248.133.825,00	(388.650,00)	(0,16)
9. 1. 8.	Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-
9. 1. 9.	Beban Lain - Lain	-	-	-	-
9. 2.	BEBAN TRANSFER	-	-	-	-
9. 2. 1.	beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	-	-
9. 2. 2.	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
9. 2. 3.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	-	-	-	-
9. 2. 4.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	-	-	-
9. 2. 5.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-
9. 2. 6.	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
9. 2. 7.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	-	-	-	-
9. 3.	DEFISIT NON OPERASIONAL	-	-	-	-
9. 3. 1.	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	-	-	-	-
9. 3. 2.	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	-
9. 3. 3.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	-	-	-
9. 4.	BEBAN LUAR BIASA	-	-	-	-
9. 4. 1.	Beban Luar Biasa	-	-	-	-
	JUMLAH BEBAN	1.652.222.609,00	1.465.594.227,00	186.628.382,00	11,30
	SURPLUS/DEFISIT - LO	(1.652.222.609,00)	(1.465.594.227,00)	(186.628.382,00)	11,30

NERACA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
N E R A C A
BIRO PBJ SEKRETARIAT DAERAH
PER 30 JUNI 2018 DAN 30 JUNI 2017

(dalam rupiah)

URAIAN	30 Juni 2018	30 Juni 2017	Kenaikan (Penurunan)
			Jumlah
ASET			
ASET LANCAR			
Kas			
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	4.227.446,00	17.821.800,00	(13.594.354,00)
Investasi Jangka Pendek	-	-	-
Piutang			
Piutang Pendapatan	-	-	-
Piutang Lainnya	-	-	-
Penyisihan Piutang	-	-	-
Beban Dibayar Dimuka	-	-	-
Persediaan	-	-	-
Jumlah	4.227.446,00	17.821.800,00	(13.594.354,00)
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-
Investasi Jangka Panjang Permanen	-	-	-
Jumlah	-	-	-
ASET TETAP			
Tanah	-	-	-
Peralatan dan Mesin	2.009.723.921,00	1.979.933.921,00	29.790.000,00
Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	(1.392.544.836,00)	(953.561.993,00)	(438.982.843,00)
Jumlah	617.179.085,00	1.026.371.928,00	(409.192.843,00)
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	-	-	-
Jumlah	-	-	-
ASET LAINNYA			
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-
Aset Tidak Berwujud	254.309.000,00	194.315.000,00	59.994.000,00
Aset Lain-Lain	-	-	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(154.485.375,00)	(97.157.500,00)	(57.327.875,00)
Jumlah	99.823.625,00	97.157.500,00	2.666.125,00
JUMLAH ASET	721.230.156,00	1.141.351.228,00	(420.121.072,00)
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-
Utang Bunga	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-
Utang Beban	125.239.000,00	1.188.353.515,00	(1.063.114.515,00)
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-
Jumlah	125.239.000,00	1.188.353.515,00	(1.063.114.515,00)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-
EKUITAS			
Ekuitas			
Jumlah	595.991.156,00	1.093.351.228,00	(497.360.072,00)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	721.230.156,00	2.281.704.743,00	(1.980.595.659,00)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca serta berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun non keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca.

Informasi yang disajikan dalam keempat laporan tersebut harus secara bersama-sama dengan informasi yang disajikan dalam Catatan atas laporan keuangan.

I.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan Biro Pengadaan Barang/Jasa digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Biro Pengadaan Barang/Jasa dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Biro Pengadaan Barang/Jasa menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber dananya ekonomis dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber dananya ekonomis yang digunakan dalam kegiatan Biro Pengadaan Barang/Jasa serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Biro Pengadaan Barang/Jasa mendanai seluruh kegiatannya dalam mencukupi kebutuhan kasnya.
- d. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi Biro Pengadaan Barang/Jasa apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

I.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Biro Pengadaan Barang/Jasa Semester Pertama Tahun Anggaran 2018 ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam peraturan berikut ini :

- a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- e) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan terakhir atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- l) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Januari 2017;

- m) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 20);
- n) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 02 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Januari 2017.

I.3. SISTIMATIKA PENULISAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II BIRO PBJ, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN REALISASI APBD

- 2.1. Biro Pengadaan Barang/Jasa
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Realisasi APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan
 - 5.1.1 Pendapatan - LRA
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 5.1.2 Belanja
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Modal
 - 5.1.3 Pendapatan – LO
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 5.1.4 Beban
 - a. Beban Pegawai
 - b. Beban Barang dan Jasa
 - 5.1.5 Aset
 - a. Aset Lancar
 - b. Aset Tetap
 - c. Aset Lain-lain

5.1.6 Kewajiban

- a. Kewajiban Jangka Pendek
- b. Kewajiban Jangka Panjang

5.1.7 Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

BIRO PBJ, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN REALISASI APBD BIRO PBJ

II.1. BIRO PENGADAAN BARANG/JASA

A. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85), Biro Pengadaan Barang/Jasa merupakan salah satu unsur staf yang berada di bawah Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan asas desentralisasi dan dipimpin oleh seorang Kepala Biro dengan Eselon II/b.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBD/APBN/Hibah/Dana Luar Negeri di Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Biro Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kebijakan, regulasi, norma, standar dan prosedur dalam bidang pengadaan barang/jasa;
2. Perumusan bahan strategi, kebijakan, rencana, dan program pembinaan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kompetensi, profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
3. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, advokasi, pendapat atau rekomendasi dan tindakan koreksi, bantuan, nasehat terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah;
4. Perumusan kebijakan sistem pemantauan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
5. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang/jasa pemerintah;

6. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas tata usaha, perencanaan, informasi, pengaduan, monitoring dan evaluasi, pelaporan hasil proses pengadaan barang/jasa;
7. Penyelenggaraan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugasnya, dan
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari :

- 1) **Biro Pengadaan Barang/Jasa**, membawahkan :
 - a) Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 - b) Bagian Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c) Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 2) **Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia**, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b) Sub Bagian Perencanaan;
 - c) Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 3) **Bagian Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa**, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pelaksana Pengadaan;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
 - c) Sub Bagian Sistem Informasi dan Dokumentasi.
- 4) **Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa**, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Advokasi Pengadaan;
 - b) Sub Bagian Bina Kelembagaan Pengadaan;
 - c) Sub Bagian Strategi dan Kebijakan Pengadaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Pengadaan Barang/Jasa didukung personil sebanyak 45 orang yang terdiri dari 35 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Berdasarkan golongan/pangkat, pegawai Biro Pengadaan Barang/Jasa dapat dikelompokkan sebagai berikut :

TABEL 2.1.
REKAPITULASI PNS BIRO PBJ PER 30 JUNI 2018
BERDASARKAN GOLONGAN/PANGKAT

Nomor	Golongan/Pangkat	Jumlah (Orang)
1.	Golongan IV/c	1
2.	Golongan IV/b	1
3.	Golongan IV/a	4
4.	Golongan III/d	7
5.	Golongan III/c	12
6.	Golongan III/b	9
7.	Golongan III/a	2
8.	Golongan II/d	-
9.	Golongan II/c	1
10.	Golongan II/b	-
11.	Golongan II/a	-
12.	Golongan I/d	-
13.	Golongan I/c	-
14.	Golongan I/b	-
15.	Golongan I/a	-
Total		37

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan formal, pegawai Biro Pengadaan Barang/Jasa dapat dikelompokkan sebagai berikut :

TABEL 2.2.
REKAPITULASI PNS BIRO PBJ PER 30 JUNI 2018
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL

Nomor	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S3	2
2.	S2	9
3.	S1	30
4.	D4	-
5.	D3	1
6.	D2	-
7.	D1	-
8.	SMA/Sederajat	3
9.	SMP/Sederajat	-
10.	SD	-
Total		45

D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Lingkungan strategis yang berpengaruh dibidang tugas Biro Pengadaan Barang/Jasa, antara lain yaitu:

- Adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan ketegasan tentang tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan program/ kegiatan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Jumlah sumber daya manusia yang potensial.
3. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai sehingga mendukung penyelesaian pelaksanaan tugas.

E. VISI DAN MISI

1. VISI

Visi Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah ***“Menjadikan Biro Pengadaan Barang/Jasa sebagai Center of Excellent (Pusat Unggulan) dalam rangka mendukung tercapainya Kalteng BERKAH”***

2. MISI

Untuk pelaksanaan lebih lanjut dari Visi yang ada tersebut, Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk menetapkan Misi-nya yaitu : ***“Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sesuai dengan Prinsip-Prinsip Pengadaan”***.

F. TUJUAN RENSTRA DAN SASARAN

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan pada tahun 2016-2021, adalah :

Misi : Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sesuai dengan Prinsip-Prinsip Pengadaan, yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sebagai wujud dari tahapan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun, maka sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) program utama yang telah ditetapkan dengan berbagai kegiatannya masing-masing yang tercantum di dalam Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, adalah :

Misi : Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sesuai dengan Prinsip-Prinsip Pengadaan, yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran : jumlah paket pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah (indikator : paket pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah berupa Literatur, Paket Lelang yang dilaksanakan, dan Penataan Dokumen Hasil Proses Pengadaan).

II.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Dasar hukum kebijakan anggaran Pemerintah Daerah adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2017 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penyusunan APBD sebagaimana ketentuan peraturan perundangan secara tegas menyatakan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang hendak dicapai, walaupun secara implisit tidak dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja berdasarkan fungsi dan urusan SKPD. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

1) Pendapatan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal dua istilah pendapatan, yaitu Pendapatan-LRA dan Pendapatan LO. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak, dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah, yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:
 1. Pajak Daerah
 2. Retribusi Daerah
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 4. Lain-lain PAD yang Sah
- b. Pendapatan Transfer
 1. Bagi Hasil DAU/DAK/Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 2. Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya
 3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
 4. Bantuan Keuangan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 1. Pendapatan Hibah
 2. Dana Darurat
 3. Pendapatan Lainnya

2) Belanja Daerah

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran menyebut belanja sedangkan Laporan Operasional menyebut dengan beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Klasifikasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi
 1. Belanja Pegawai
 2. Belanja Barang dan Jasa
 3. Belanja Bunga
 4. Belanja Subsidi
 5. Belanja Hibah
 6. Bantuan Sosial
- b. Belanja Modal
 1. Belanja Modal Tanah
 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya

6. Belanja Aset Lainnya

c. Belanja Tak Terduga

3) Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.

4) Pembiayaan

Ada dua jenis pembiayaan yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

II.3. REALISASI APBD BIRO PENGADAAN BARANG/JASA

Anggaran Pendapatan Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2018 sebesar Rp.0 dan Belanja Biro Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 3.754.000.000,00 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 2.407.844.000,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.216.106.000,00 dan belanja modal sebesar Rp. 130.050.000,00.

Realisasi pendapatan Biro Pengadaan Barang/Jasa semester pertama Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 0,00, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 1.162.465.880,00 yang terdiri atas realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 899.018.500,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp.263.447.380,00 dan belanja modal sebesar Rp. 0,00.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pada bagian ini akan disajikan analisa capaian kinerja keuangan yang digambarkan dalam ringkasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Biro Pengadaan Barang/Jasa secara keseluruhan sebagai akuntabilitas keuangan terhadap capaian indikator dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan.

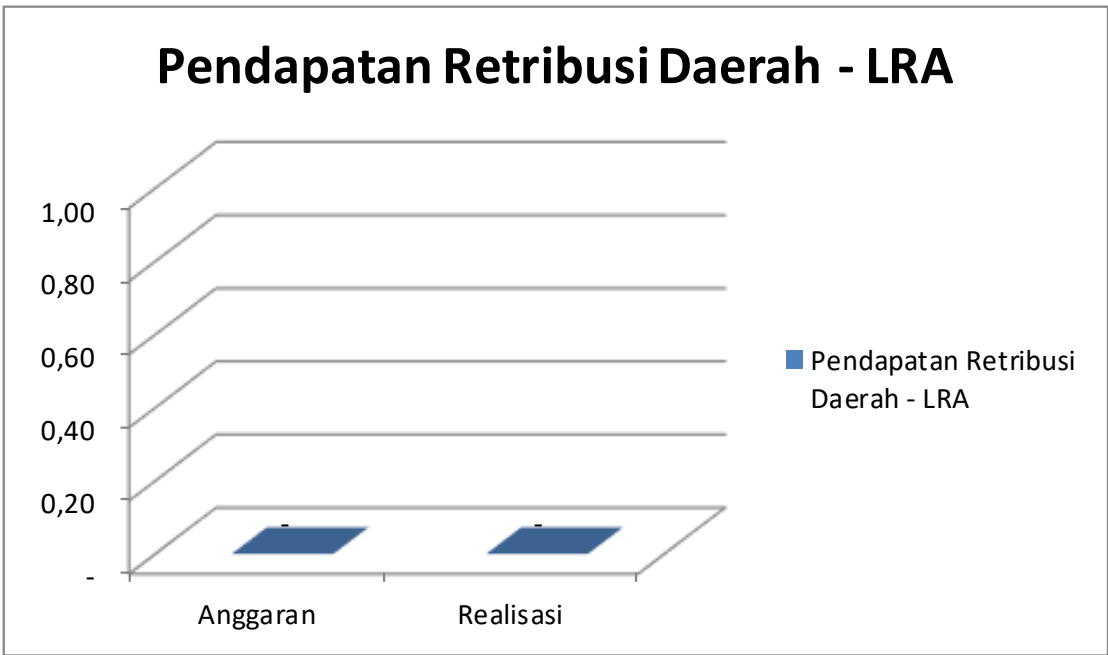
Dari gambaran realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semester Pertama Tahun Anggaran 2018 Biro Pengadaan Barang/Jasa dapat dijelaskan sebagai berikut :

III.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Tabel 3.1
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Semester Pertama Tahun 2018

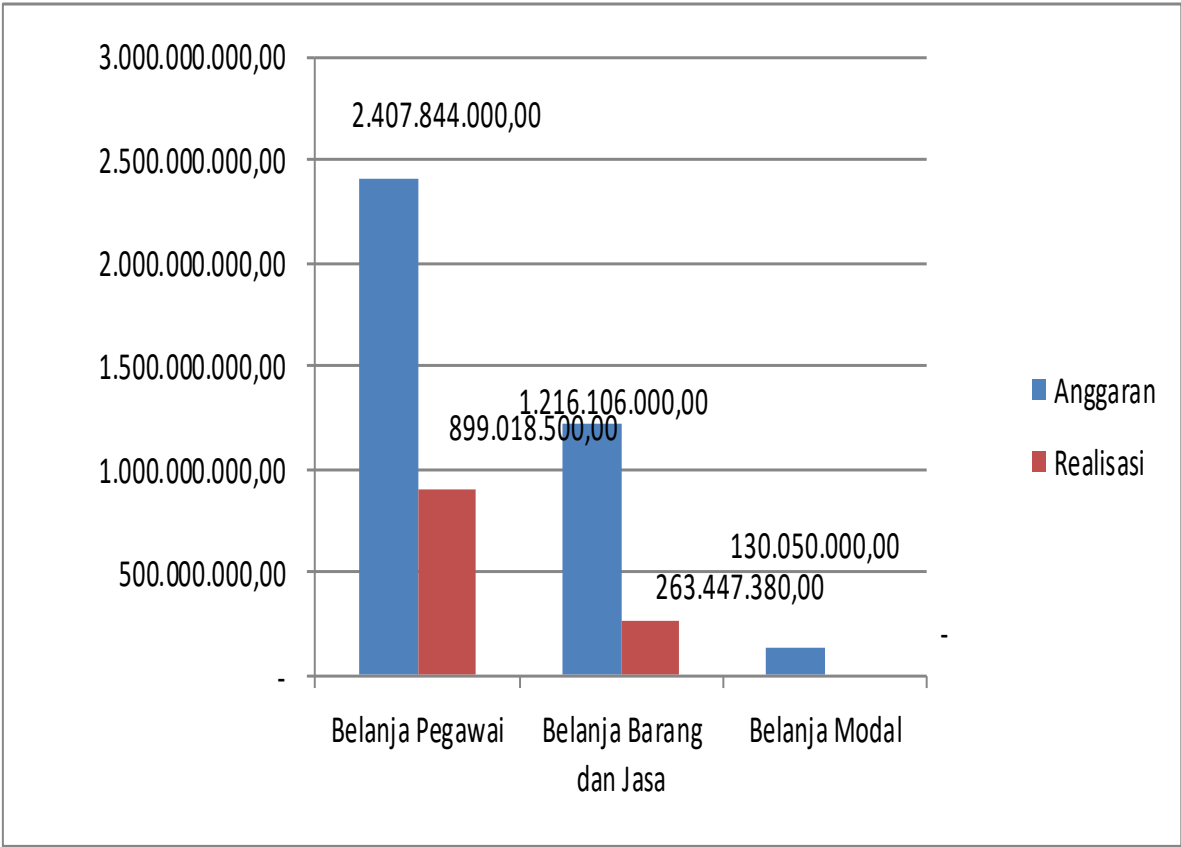
(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	-	-	-	-
Total Belanja	-	0,00	0,00	-



(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
Belanja Pegawai	2.407.844.000,00	899.018.500,00	1.508.825.500,00	37,34
Belanja Barang dan Jasa	1.216.106.000,00	263.447.380,00	952.658.620,00	21,66
Belanja Modal	130.050.000,00	-	130.050.000,00	0,00
Total Belanja	3.754.000.000,00	1.162.465.880,00	2.591.534.120,00	30,97



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

IV.1. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggung jawaban keuangan daerah.

Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggung jawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Entitas pelaporan keuangan adalah Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Tengah.

IV.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi disusun berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Berikut ini disajikan delapan prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

- 1. Basis akuntansi (*accounting basis*);**
 - a. **Basis akuntansi** yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yaitu transaksi dan kejadian diakui atas akrual.
 - b. **Transaksi penerimaan kas** atau pengeluaran kas dibukukan pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi.
 - c. **Basis Kas untuk Laporan Perhitungan APBD** (Laporan Realisasi Anggaran) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Kas Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Daerah. Entitas Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba/rugi. Penentuan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan realisasi pembiayaan dengan seluruh belanja yang telah dibayar. Sementara itu, pendapatan dan beban selain kas seperti bantuan, hibah dan sumbangan dalam bentuk barang dan jasa hanya

disajikan sebagai informasi tambahan pada Laporan Perhitungan APBD (Laporan Realisasi Anggaran).

- d. **Basis AkruaI Untuk Neraca** berarti bahwa aktiva, utang, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada posisi keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Prinsip nilai perolehan (*historical cost principle*);

- a. Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk melunasi utang di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.
- b. Nilai perolehan lebih handal dibandingkan penilaian yang lain karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

3. Prinsip realisasi (*realization principle*);

- a. Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut.
- b. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi Pemerintah Daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

4. Prinsip substansi mengungguli formalitas (*substance over form principle*);

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.

5. Prinsip periodisitas (*periodicity principle*);

- a. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
- b. Periode pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan.

6. Prinsip konsistensi (*consistency principle*);

- a. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi

internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

- b. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

7. Prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure principle*);

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas laporan keuangan.

8. Prinsip penyajian wajar (*fair presentation principle*).

- a. Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas.
- b. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aktiva atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan utang tidak dinyatakan terlalu rendah.

IV.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Informasi Kebijakan Akun Neraca Daerah yang penting disajikan adalah :

1. Periode Akuntansi

Periode akuntansi yang digunakan adalah 1 Januari 2018 s/d 30 Juli 2018.

2. Pos-Pos Neraca

Kebijakan pos-pos neraca menjelaskan tentang perlakuan akuntansi atas akun neraca. Akun neraca secara garis besar terdiri atas:

- a. Aset
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas

A. ASET

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah mengatur perlakuan akuntansi aset. Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aktiva tetap pada neraca dilakukan dengan menjumlahkan semua belanja modal baik yang berasal dari belanja modal aparatur maupun publik.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lain-lain.

1) **ASET LANCAR**

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri atas :

1.1. Kas di Kas Daerah

1.1.1. Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.1.2. Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

1.1.3. Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Adalah dana yang masih tersisa dalam tahun anggaran berjalan dan belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan berakhirnya tahun anggaran tersebut.

1.2.1 Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat pada tahun berikutnya berdasarkan *stock opname*.

1.2.2 Kas di Bendahara Pengeluaran dinilai dalam neraca berdasarkan jumlah hasil *stock opname*.

2) **PIUTANG**

- 2.1 Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
- 2.2 Piutang terdiri atas : bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lain-lain.
- 2.3 Piutang yang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.
- 2.4 Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- 2.5 Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang dicatat atas laporan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain :
 - Klarifikasi piutang menurut umur
 - Klarifikasi piutang menurut debitur

3) **PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS / MATERIAL**

- 3.1 Persediaan Barang Pakai Habis / Material adalah barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
- 3.2 Persediaan Barang Pakai Habis / Material terdiri atas perlengkapan alat tulis kantor, perlengkapan benda pos, perlengkapan alat kebersihan, Perlengkapan pegawai, perlengkapan bahan laboratorium, perlengkapan ban, aki, dan suku cadang kendaraan / alat-alat berat, perlengkapan perkakas kerja, dsb.
- 3.3 Persediaan Barang Pakai Habis / Material diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai.
- 3.4 Persediaan Barang Pakai Habis / Material diukur berdasarkan hasil inventarisasi fisik barang yang belum terpakai.
- 3.5 Persediaan Barang Pakai Habis / Material dinilai berdasarkan :
 - Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian.
 - Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualan jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.
- 3.6 Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Persediaan Barang Pakai Habis / Material dicatat atas laporan keuangan antara lain rincian/klarifikasi barang dan jumlah masing-masing klarifikasi.

4) INVESTASI JANGKA PANJANG

- 4.1 Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- 4.2 Investasi jangka panjang antara lain terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 - b. Investasi jangka panjang lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- 4.3 Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- 4.4 Penghasilan dari investasi saham diakui apabila Pemerintah Daerah menerima deviden dan/atau bunga dari perusahaan yang diinvestasikan (*investee*) pada periode berjalan dan dicatat sebagai pendapatan.
- 4.5 Harga perolehan investasi jangka panjang dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi. Saldo pada tanggal neraca harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal tersebut.
- 4.6 Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal neraca.
- 4.7 Investasi dalam saham yang dijual/ditukar dengan aktiva yang lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan, atau harga pasar yang mana lebih rendah (*Lower Cost or Market*).

5) ASET TETAP

- 5.1 Aset tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material.

5.2 Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.

5.3 Aset tetap antara lain terdiri dari :

- Tanah
- Jalan dan Jembatan
- Bangunan Air (irigasi)
- Instalasi
- Jaringan
- Bangunan Gedung
- Bangunan Monumen
- Alat-Alat Besar
- Alat Angkutan
- Alat Bengkel dan Alat Ukur
- Alat Pertanian
- Alat-Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga
- Alat Studio dan Alat Komunikasi
- Alat-Alat Kedokteran
- Alat-Alat Laboratorium
- Buku dan Perpustakaan
- Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan
- Hewan Ternak dan Tumbuhan
- Alat Keamanan

5.4 Penjelasan Akun Aset Tetap

a. Tanah

Tanah meliputi tanah kantor, tanah sarana kesehatan, tanah sarana pendidikan, tanah rumah dinas, tanah sarana olahraga, tanah sarana sosial, tanah terminal, angkutan darat, tanah angkutan laut, tanah waduk, tanah saluran air, tanah jalan, tanah dermaga dan lain-lain sejenisnya.

b. Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan meliputi jalan, jembatan, terowongan dan lain-lain sejenisnya.

c. Bangunan Air (Irigasi)

Bangunan Air meliputi waduk, pintu air, saluran air dan lain-lain sejenisnya.

d. Instalasi

Instalasi meliputi instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan air kotor, instalasi pengolahan bahan bangunan dan lain-lain sejenisnya.

- e. Jaringan
Jaringan meliputi jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas dan lain-lain sejenisnya.
- f. Bangunan Gedung
Bangunan Gedung meliputi gedung kantor, gedung sarana kesehatan, gedung sarana pendidikan, gedung rumah dinas, gedung sarana olahraga, gedung sarana tempat ibadah, gedung sarana sosial dan lain-lain sejenisnya.
- g. Bangunan Monumen
Bangunan Monumen meliputi bangunan bersejarah, bangunan tugu peringatan, bangunan tugu titik kontrol dan lain-lain sejenisnya.
- h. Alat-alat Besar
Alat-alat Besar meliputi alat-alat besar darat, alat-alat besar apung, alat-alat bantu dan lain-lain sejenisnya.
- i. Alat-alat Angkutan
Alat Angkutan meliputi alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tidak bermotor, alat angkutan apung bermotor, alat angkutan apung tidak bermotor dan lain-lain sejenisnya.
- j. Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur meliputi alat bengkel bermesin, alat bengkel tidak bermesin, alat ukur dan lain-lain sejenisnya.
- k. Alat Pertanian
Alat Pertanian meliputi alat pengolahan, alat pemeliharaan/panen penyimpanan dan lain-lain sejenisnya.
- l. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat-alat kantor dan Rumah Tangga meliputi alat kantor, alat rumah tangga, komputer, meja kursi kerja dan lain-lain sejenisnya.
- m. Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alat Studio dan Alat Komunikasi meliputi alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar dan lain-lain sejenisnya.
- n. Alat-alat Kedokteran
Alat-alat kedokteran meliputi alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kedokteran KB, alat kedokteran mata, alat kedokteran THT, alat rontgen, alat farmasi, alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan, alat kedokteran bagian penyakit dalam dan lain-lain sejenisnya.

- o. Alat-alat Laboratorium
Alat-alat laboratorium meliputi unit-unit laboratorium, alat laboratorium mikrobiologi, alat laboratorium hidrokimia, alat laboratorium buatan dan lain-lain sejenisnya.
- p. Buku dan Perpustakaan
Buku dan Perpustakaan meliputi buku, terbitan berkala, barang-barang perpustakaan dan lain-lain sejenisnya.
- q. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan meliputi barang bercorak kebudayaan, alat olahraga lainnya dan lain-lain sejenisnya.
- r. Hewan/Ternak dan Tumbuhan
Hewan/Ternak dan Tumbuhan meliputi hewan, tanaman dan lain-lain sejenisnya.
- s. Alat Keamanan
Alat Keamanan meliputi alat keamanan dan lain-lain sejenisnya.

5.4.1 Pengakuan

- Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.
- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- Transaksi dan kejadian setelah perolehan aktiva tetap meliputi pemeliharaan (maintenance), perbaikan (repairs), penambahan (additions), pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

Pemeliharaan (maintenance) adalah hal-hal yang dilakukan untuk memperoleh kondisi kerja (operasi) yang baik dari sebuah aset tetap (misalnya pemeliharaan rutin, secara periodik) dan sifatnya rutin. Pemeliharaan ini tidak memperbaiki atau menambah umur ekonomis aktiva. Biaya pemeliharaan diakui langsung sebagai beban pada periode berjalan dan dicatat pada rekening Biaya Pemeliharaan.

Penambahan adalah peningkatan nilai aset karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap karena

berkurangnya kuantitas. Pengurangan aktiva tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengembangan adalah peningkatan nilai aktiva tetap karena meningkatnya manfaat aktiva tetap. Pengembangan aktiva tetap diharapkan akan : (1) memperpanjang usia manfaat, (2) meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan atau menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap.

Penggantian utama (replacements) adalah memperbaharui bagian utama aktiva tetap dan tidak bersifat rutin. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara pengurangan nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset.

5.4.2 Pengukuran

- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.
- Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
- Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan jaringan tersebut siap untuk digunakan.

- Bangunan air (irigasi) diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.
- Bangunan gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris dan pajak.
- Bangunan Monumen diukur berdasarkan revaluasi terhadap bangunan monumen bersangkutan.
- Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.
- Alat-alat ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat bengkel dan alat ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat pertanian diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

- Alat-alat angkutan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat kantor dan rumah tangga diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat studio dan alat komunikasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat-alat kedokteran diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat Laboratorium diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Buku Perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
- Barang Bercorak kesenian/kebudayaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Hewan/ ternak dan tumbuhan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.

- Alat keamanan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.

5.4.3 Penilaian

Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

5.4.4 Pengungkapan

- Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (*disclosure*) dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai penilaian, penyusutan (depresiasi) pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aktiva tetap.
- Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan harga dasar yang digunakan dalam penilaian aktiva tetap.

6) **DANA CADANGAN**

- 6.1 Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.
- 6.2 Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.
- 6.3 Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Dana Cadangan antara lain klarifikasi Dana Cadangan berdasarkan tujuan pembentukan.

7) **ASET LAIN-LAIN**

Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan dana cadangan. Aset lain-lain terdiri dari :

- 7.1. **Tagihan Penjualan Angsuran** menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah dan kendaraan dari tagihan penjualan angsuran lainnya.
- 7.2. **Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) dan Kerjasama Operasi (KSO) dan Penjelasannya**

Adalah pemanfaatan barang/kekayaan milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara pihak tersebut membangun sarana beserta fasilitas diatas tanah tersebut, kemudian menyerahkan tanah, bangunan, atau sarana lain

berikut fasilitas yang telah dibangunnya untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu dan akan diserahkan kembali kepada daerah setelah berakhirnya waktu yang telah disepakati. Pengakuan atas Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) Dan Kerjasama Operasi (KSO) berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut dibangun, Biaya pembangunan yang tercantum di perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) atau sebesar nilai wajar yang paling obyektif atau berdaya uji.

- 7.3. **Konstruksi Dalam Pengerjaan** adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan.

Bangunan dalam pekerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan bangunan dalam pekerjaan adalah tujuan peruntukan bangunan, unit penanggungjawab bangunan dan hal-hal lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Lain-Lain Aktiva adalah aktiva di luar tagihan penjualan angsuran, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

B. KEWAJIBAN

Tujuan kebijakan akuntansi utang adalah mengatur perlakuan akuntansi utang. Perlakuan akuntansi utang mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan utang.

Kewajiban adalah utang kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban jangka pendek dan Kewajiban jangka panjang.

1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

- a. Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas :

- 1) **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo** merupakan sebagian dari utang pokok jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

- 2) **Utang Biaya Pinjaman** merupakan utang yang terjadi sebagai ikutan utang pokok, yang berupa bunga, denda dan *commitmen fee/Commitmen Charge*. Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada Lender karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, dimana Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak. *Comitment Fee* adalah utang yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah sebesar prosentase tertentu karena tidak ditariknya pinjaman yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.
- 3) **Utang Jangka Pendek Lainnya** adalah utang jangka pendek yang tidak dapat dikelompokkan pada perkiraan tersebut diatas.
 - b. Kewajiban jangka pendek dilakukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversi ke rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi.
 - c. Kewajiban jangka pendek dicatat pada saat timbulnya utang tersebut yaitu jika sudah ada ketetapannya.

2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu priode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

- a. **Utang Jangka Panjang** merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang jangka panjang dapat berasal dari pinjaman dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang (pinjaman) jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aktiva Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
- b. **Utang Bunga** merupakan utang kepada kreditur atas pinjaman jangka panjang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari 1 (satu) satu periode akuntansi. Utang jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) di konversikan ke

rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

- c. **Utang Belanja** merupakan utang yang berasal dari belanja yang sudah di bebaskan tetapi belum dilakukan pembayaran sehingga masih merupakan kewajiban.
- d. **Utang Pajak** merupakan utang yang berasal dari pajak yang belum dibayar. Utang Pajak timbul karena sampai dengan akhir tahun pajak yang telah dipungut oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah namun belum disetorkan ke KPKN.
- e. **Pendapatan Diterima di Muka** merupakan utang pihak ketiga yang berasal dari setoran kelebihan pembayaran uang muka. Rekening Pendapatan Diterima di Muka muncul karena sampai dengan akhir tahun ada jenis pendapatan yang belum direalisasi sampai namun telah dilakukan penerimaan kas, sehingga pada akhir periode akuntansi perlu dicatat berapa jumlah yang belum direalisasi menjadi pendapatan
- f. **Utang Lain-lain** merupakan utang lancar yang tidak dapat diklasifikasikan pada jenis-jenis rekening utang.

C. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

IV.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Dalam penyajian Catatan atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diungkapkan dalam penyajian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik tersebut adalah :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan dan
4. Dapat dipahami

Penjelasan terhadap akun-akun neraca hanya mencakup transaksi yang terjadi pada pos-pos perkiraan neraca yang bersangkutan. Diharapkan dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan khususnya Neraca Daerah ini dapat memudahkan pemahaman dan sekaligus memberikan informasi menyangkut Laporan Keuangan Biro Pengadaan Barang/Jasa kepada para pemakai/stakeholders.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

V.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

Bertitik tolak pada arti dan ruang lingkup keuangan daerah, maka dikemukakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk juga didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya sesuai struktur APBD Biro Pengadaan Barang/Jasa berikut disajikan uraian tentang realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, Ekuitas sebagai berikut :

V.1.1. PENDAPATAN-LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA:

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Tengah Semester Pertama Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 0,00 dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp. 0,00. Pada Biro Pengadaan Barang/Jasa tidak terdapat pendapatan. Rincian realisasi pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Semester Pertama TA. 2018

No.	Uraian	Semester Pertama TA 2018		Realisasi Semester Pertama TA 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1.	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-

V.1.2. BELANJA

Realisasi belanja Biro Pengadaan Barang/Jasa Semester Pertama Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 1.162.465.880,00 atau sekitar 30,97% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp. 3.754.000.000,00. Sedangkan realisasi belanja Semester Pertama Tahun Anggaran 2017 hanya sebesar Rp. 567.353.515,00. Realisasi belanja Biro Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp.

1.162.465.880,00 dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu belanja operasi sebesar Rp. 1.162.465.880,00 dan belanja modal sebesar Rp. 0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.
Realisasi Belanja Semester Pertama Tahun Anggaran 2018

No.	Uraian	Semester Pertama TA 2018		Semester Pertama TA 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
	Belanja Operasi					
1.	Belanja Pegawai	2.407.844.000,00	899.018.500,00	301.455.000,00	597.563.500,00	198,23
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.216.106.000,00	263.447.380,00	265.898.515,00	(2.451.135,00)	(0,92)
	Belanja Modal					
1	Belanja Modal	130.050.000,00	-	-	-	-
Jumlah		3.754.000.000,00	1.162.465.880,00	567.353.515,00	595.112.365,00	104,89

- a. **Belanja Pegawai** **Rp. 899.018.500,00**
- Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 2.407.844.000,00 atau 64,14% dari total anggaran Biro Pengadaan Barang/Jasa. Sampai semester pertama Tahun Anggaran 2018 telah terealisasi sebesar Rp. 899.018.500,00 atau 37,34% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.508.825.500,00 atau 62,66%. Sedangkan realisasi semester pertama Tahun 2017 sebesar Rp. 301.455.000,00. Rincian realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.
Rincian Realisasi Belanja Pegawai Semester Pertama TA 2018
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Realisasi Semester Pertama TA. 2017
	Anggaran 2018	Realisasi Semester Pertama 2018	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	2.407.844.000,00	899.018.500,00	597.563.500,00	198,23	301.455.000,00
- Honorarium PNS	2.161.880.000,00	797.357.500,00	593.237.500,00	290,63	204.120.000,00
- Honorarium Non PNS	245.964.000,00	101.661.000,00	4.326.000,00	4,44	97.335.000,00
Jumlah	2.407.844.000,00	899.018.500,00	597.563.500,00	198,23	301.455.000,00

1. **Belanja Honorarium PNS** **Rp. 797.357.500,00**

Belanja Honorarium PNS dianggarkan sebesar Rp. 2.161.880.000,00 dan sampai semester pertama Tahun Anggaran 2018 telah terealisasi sebesar Rp. 797.357.500,00 atau 36,88%. Sedangkan realisasi semester pertama tahun 2017 sebesar Rp. 204.120.000,00. Rincian obyek belanja honorarium PNS dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018			Semester Pertama Tahun 2017	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	217.880.000,00	46.857.500,00	21,51	49.120.000,00	104,83
Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.944.000.000,00	750.500.000,00	38,61	155.000.000,00	20,65
Jumlah	2.161.880.000,00	797.357.500,00	36,88	204.120.000,00	125,48

2. **Belanja Honorarium Non PNS** **Rp. 101.661.000,00**

Belanja Honorarium Non PNS dianggarkan sebesar Rp.245.964.000,00 dan sampai semester pertama Tahun Anggaran 2018 telah terealisasi sebesar Rp. 101.661.000,00 atau 41,33%. Sedangkan realisasi semester pertama tahun 2017 sebesar Rp. 97.335.000,00. Rincian obyek belanja honorarium non PNS dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018			Semester Pertama Tahun 2017	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	245.964.000,00	101.661.000,00	41,33	97.335.000,00	95,74
Jumlah	245.964.000,00	101.661.000,00	41,33	97.335.000,00	95,74

b. **Belanja Barang dan Jasa** **Rp. 263.447.380,00**

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 1.216.106.000,00 atau 32,39% dari total anggaran Biro Pengadaan Barang/Jasa. Sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran 2018 sudah terealisasi sebesar Rp. 263.447.380,00 atau 21,66% sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 952.658.620,00 atau 78,34%. Sedangkan realisasi semester pertama tahun 2016 sebesar Rp. 265.898.515,00. Secara rinci realisasi Belanja Barang dan Jasa dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.4.

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Semester Pertama TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Realisasi Semester Pertama TA. 2017 (Rp)
	Anggaran 2018	Realisasi Semester Pertama 2018	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
Belanja Operasi					
Belanja Barang dan Jasa					
Belanja Bahan Pakai Habis	182.784.100,00	43.896.350,00	(138.887.750,00)	24,02	91.505.400,00
Belanja Jasa Kantor	320.200.000,00	74.962.262,00	(245.237.738,00)	23,41	24.590.800,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	50.259.000,00	19.185.000,00	(31.074.000,00)	38,17	37.575.000,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	-	-
Belanja Makanan dan Minuman	48.890.000,00	6.170.000,00	(42.720.000,00)	12,62	9.412.500,00
Belanja Perjalanan Dinas	607.812.900,00	119.233.768,00	(488.579.132,00)	19,62	102.814.815,00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	4.360.000,00	-	(4.360.000,00)	-	-
Jumlah	1.216.106.000,00	263.447.380,00	(952.658.620,00)	21,66	265.898.515,00

1. Belanja Bahan Pakai Habis Rp. 43.896.350,00

Belanja Bahan Pakai Habis dianggarkan sebesar Rp. 182.784.100,00 dan sampai semester pertama Tahun Anggaran 2018 telah terealisasi sebesar Rp. 43.896.350,00 atau 24,01%. Sedangkan realisasi semester pertama Tahun 2017 sebesar Rp. 91.505.400,00. Rincian obyek belanja pakai habis dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018			Semester Pertama Tahun 2017	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Alat Tulis Kantor	175.484.100,00	41.946.350,00	23,90	89.555.400,00	(113,50)
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	3.900.000,00	1.950.000,00	50,00	1.950.000,00	-
Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	-	0,00	-	-
Belanja Bahan Dekorasi	1.900.000,00	-	0,00	-	-
Jumlah	182.784.100,00	43.896.350,00	24,02	91.505.400,00	(108,46)

2. Belanja Jasa Kantor Rp. 74.962.262,00

Belanja Jasa Kantor dianggarkan sebesar Rp. 320.200.000,00 dan sampai semester pertama Tahun Anggaran 2018 telah terealisasi sebesar Rp. 74.962.262,00 atau 23,41%. Sedangkan realisasi semester pertama Tahun 2017 sebesar Rp. 24.590.800,00. Rincian obyek belanja jasa kantor dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018			Semester Pertama Tahun 2017	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Telepon	48.000.000,00	19.677.262,00	40,99	19.490.800,00	0,95
Belanja Kawat/Faksimili/Internet	192.000.000,00	53.235.000,00	27,73	-	100,00
Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	300.000,00	50,00	300.000,00	-
Belanja Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor	21.000.000,00	1.750.000,00	8,33	4.800.000,00	-
Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	58.200.000,00	-	0,00	-	-
Belanja Jasa Pembaca Doa	400.000,00	-	0,00	-	-
Jumlah	320.200.000,00	74.962.262,00	23,41	24.590.800,00	67,20

3. Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 19.185.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp. 50.259.000,00 dan sampai semester pertama Tahun Anggaran 2018 telah terealisasi sebesar Rp. 19.185.000,00 atau 38,17%. Sedangkan realisasi semester pertama tahun 2017 sebesar Rp. 37.575.000,00. Rincian obyek belanja cetak dan penggandaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018			Semester Pertama Tahun 2017	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Cetak	4.210.000,00	2.105.000,00	50,00	4.060.000,00	(92,87)
Belanja Penggandaan	39.874.000,00	14.475.000,00	36,30	27.075.000,00	(87,05)
Belanja Penjilidan	6.175.000,00	2.605.000,00	42,19	6.440.000,00	(147,22)
Jumlah	50.259.000,00	19.185.000,00	38,17	37.575.000,00	(95,86)

4. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp. 0,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir dianggarkan sebesar Rp. 1.800.000,00 dan sampai semester pertama Tahun Anggaran 2018 telah terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Sedangkan realisasi semester pertama Tahun 2017 sebesar Rp. 0,00. Rincian obyek sewa rumah/gedung/gudang/parkir dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018			Semester Pertama 2017	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.800.000,00	-	-	-	-
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	-	-	-	-	-
Jumlah	1.800.000,00	-	-	-	-

5. **Belanja Makanan dan Minuman** **Rp. 6.170.000,00**

Belanja Makanan dan Minuman dianggarkan sebesar Rp. 48.890.000,00 dan sampai semester pertama Tahun Anggaran 2018 telah terealisasi sebesar Rp. 6.170.000,00 atau 12,62%. Sedangkan realisasi semester pertama Tahun 2017 sebesar Rp. 9.412.500,00. Rincian obyek belanja makanan dan minuman dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018			Semester Pertama Tahun 2017	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.765.000,00	6.170.000,00	28,35	9.412.500,00	(52,55)
Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	27.125.000,00	-	-	-	-
					-
Jumlah	48.890.000,00	6.170.000,00	12,62	9.412.500,00	(52,55)

6. **Belanja Perjalanan Dinas** **Rp. 119.233.768,00**

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp. 607.812.900,00 dan sampai semester pertama Tahun Anggaran 20178 telah terealisasi sebesar Rp. **119.233.768,00** atau 19,62%. Sedangkan realisasi semester pertama Tahun 2017 sebesar Rp. 102.814.815,00. Rincian obyek belanja perjalanan dinas dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018			Semester Pertama Tahun 2017	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84.700.000,00	12.655.918,00	14,94	32.417.435,00	(156,14)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	523.112.900,00	106.577.850,00	20,37	70.397.380,00	33,95
Jumlah	607.812.900,00	119.233.768,00	19,62	102.814.815,00	13,77

7. **Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**
Rp.0,00

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dianggarkan sebesar Rp. 4.360.000,00 dan sampai semester pertama Tahun Anggaran 2018 telah terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Sedangkan realisasi semester pertama Tahun 2017 sebesar Rp. 0,00. Rincian obyek belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018			Semester Pertama Tahun 2017	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Bimbingan Teknis	4.360.000,00	-	-	-	-
Jumlah	4.360.000,00	-	-	-	-

c. **Belanja Modal** **Rp. 0,00**

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 130.050.000,00 atau 3,46% dari total anggaran Biro Pengadaan Barang/Jasa. Sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran 2018 sudah terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0% sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 130.050.000,00,00 atau 100,00%. Sedangkan realisasi semester pertama Tahun 2017 sebesar Rp. 0,00. Secara rinci realisasi Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.5.

Rincian Realisasi Belanja Modal Semester Pertama TA. 2018

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Realisasi Semester Pertama 2017
	Anggaran 2018	Realisasi Semester Pertama 2018	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
Belanja Modal Tanah					
Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Gedung Bangunan	-	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mini Komputer	10.600.000,00	-	(10.600.000,00)	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	26.800.000,00	-	(26.800.000,00)	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	92.650.000,00	-	(92.650.000,00)	-	-
Jumlah	130.050.000,00	-	(130.050.000,00)	-	-

1. **Belanja Modal Pengadaan Komputer** **Rp. 0,00**

Belanja Modal Pengadaan Komputer dianggarkan sebesar Rp. 130.050.000,00 dan sampai semester pertama Tahun Anggaran 2018 telah terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Sedangkan realisasi semester pertama Tahun 2017 sebesar Rp. 0,00. Rincian obyek belanja modal pengadaan komputer dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018			Semester Pertama Tahun 2017	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal PengadaanKomputer					
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	10.600.000,00	-	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	26.800.000,00	-	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan	92.650.000,00	-	-	-	-
Jumlah	130.050.000,00	-	-	-	-

V.1.3. PENDAPATAN-LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

Biro Pengadaan Barang/Jasa tidak terdapat anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pada Tahun Anggaran 2018 maupun tahun sebelumnya.

Tabel 5.6.

Rincian Pendapatan - LO Semester Pertama TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Semester Pertama 2018	Saldo Semester Pertama 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	-	-	-	-
Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-	-	-

V.1.4. BEBAN

Beban Biro Pengadaan Barang/Jasa semester pertama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.652.222.609,00 atau turun sebesar 64,92% dari beban semester pertama Tahun 2017 sebesar Rp. 4.711.888.440,00. Beban dikelompokkan menjadi empat yaitu beban operasi, beban transfer, defisit non operasional, dan beban luar biasa.

Tabel 5.7.

Rincian Beban Semester Pertama TA 2018

(dalam rupiah)

BEBAN OPERASI	1.652.222.609,00	4.711.888.440,00	(3.059.665.831,00)	(64,94)
Beban Pegawai - LO	926.621.000,00	2.626.270.000,00	(1.699.649.000,00)	(64,72)
Beban Barang dan Jasa	477.856.434,00	1.588.919.072,00	(1.111.062.638,00)	(69,93)
Beban Bunga	-	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-	-
Beban Hibah	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	247.745.175,00	496.699.368,00	(248.954.193,00)	(50,12)
Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-
Beban Lain - Lain	-	-	-	-
BEBAN TRANSFER	-	-	-	-
beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	-	-
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	-	-	-	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	-	-	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	-	-	-	-
DEFISIT NON OPERASIONAL	-	-	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	-	-	-	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	-	-	-
BEBAN LUAR BIASA	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-	-
Jumlah Beban	1.652.222.609,00	4.711.888.440,00	(3.059.665.831,00)	(64,94)

a. **Beban Operasi** **Rp. 1.652.222.609,00**

Beban Operasi semester pertama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.652.222.609,00 lebih tinggi dari beban operasi semester pertama Tahun 2017 senilai Rp. 1.465.594.227,00. Beban Operasi terdiri atas Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Penyusutan dan Amortisasi, serta Beban Lain - Lain. Rincian beban operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.7.
Rincian Beban Operasi Semester Pertama TA 2018

(dalam rupiah)			
Uraian	Saldo Semester Pertama 2018	Saldo Semester Pertama 2017	Kenaikan/ (Penurunan)
1	2	3	4
Beban Pegawai	926.621.000,00	798.145.000,00	128.476.000,00
Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.460.000,00	59.810.000,00	14.650.000,00
Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.500.000,00	641.000.000,00	109.500.000,00
Beban Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	101.661.000,00	97.335.000,00	4.326.000,00
Beban Barang dan Jasa	477.856.434,00	419.315.402,00	58.541.032,00
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	78.125.250,00	97.243.600,00	(19.118.350,00)
Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.950.000,00	1.950.000,00	-
Beban Dokumentasi	1.500.000,00	-	1.500.000,00
Beban Bahan Dekorasi	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Beban Jasa Telepon	23.567.280,00	18.419.487,00	5.147.793,00
Beban Jasa Kawat/ Faksimili/ Internet	106.470.000,00	48.000.000,00	58.470.000,00
Beban Jasa Paket/ Pengiriman	300.000,00	300.000,00	-
Beban Jasa Service Peralatan/ Perlengkapan Kantor	1.975.000,00	4.800.000,00	(2.825.000,00)
Beban Cetak	2.105.000,00	4.060.000,00	(1.955.000,00)
Beban Penggandaan	20.020.750,00	30.450.000,00	(10.429.250,00)
Beban Penjilidan	3.035.000,00	6.740.000,00	(3.705.000,00)
Beban Makanan dan Minuman Rapat	7.885.000,00	9.412.500,00	(1.527.500,00)
Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	50.000.000,00	-	50.000.000,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.454.204,00	127.542.435,00	(91.088.231,00)
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	137.018.950,00	70.397.380,00	66.621.570,00
Beban Bimbingan Teknis	6.450.000,00	-	6.450.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	247.745.175,00	248.133.825,00	(10.866.900,00)
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	12.359.390,00	12.359.390,00	-
Beban Penyusutan Alat Kantor	26.673.500,00	26.673.500,00	-
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	17.925.300,00	17.925.300,00	-
Beban Penyusutan Komputer	144.055.310,00	153.974.060,00	(9.918.750,00)
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	2.942.050,00	3.890.200,00	(948.150,00)
Beban Penyusutan Alat Studio	4.917.000,00	4.917.000,00	-
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	4.105.000,00	4.105.000,00	-
Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	2.979.000,00	-	2.979.000,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	31.788.625,00	24.289.375,00	7.499.250,00
Beban Lain - Lain	-	-	-
Beban Lain - Lain	-	-	-
Jumlah Beban	1.652.222.609,00	1.465.594.227,00	176.150.132,00

1. Beban Pegawai **Rp. 926.621.000,00**

Beban Pegawai semester pertama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 926.621.000,00 sedangkan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 899.018.500,00 selisih sebesar (Rp. 27.602.500,00). Selisih tersebut karena adanya pembayaran honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tahun 2018 yang belum direalisasikan pembayarannya. Beban Pegawai semester pertama Tahun 2017 sebesar Rp. 798.145.000,00. Rincian beban pegawai sebagai berikut :

Tabel 5.8.

Rincian Beban Pegawai Semester Pertama TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018		Selisih	Saldo Semester Pertama Tahun 2017
	Beban	Realisasi Belanja		
1	2	3	4	5
Beban Pegawai				
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.460.000,00	46.857.500,00	27.602.500,00	10.690.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.500.000,00	750.500.000,00	-	486.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	101.661.000,00	101.661.000,00	-	-
Jumlah	926.621.000,00	899.018.500,00	27.602.500,00	496.690.000,00

a. Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan **Rp. 74.460.000,00**

Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan semester pertama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 74.460.000,00 lebih besar apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 46.857.500,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 27.602.500,00 yang merupakan belanja yang belum direalisasikan pembayarannya. Saldo semester pertama Tahun 2017 untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 10.690.000,00.

b. Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Rp. 750.500.000,00

Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa semester pertama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 750.500.000,00 sama dengan realisasi Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa. Saldo semester pertama Tahun 2017 untuk Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 486.000.000,00.

c. **Beban Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap**
Rp. 750.500.000,00

Beban Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap semester pertama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 101.661.000,00 sama dengan realisasi Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap. Saldo semester pertama Tahun 2017 untuk Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap sebesar Rp. 0,00.

2. **Beban Barang dan Jasa** **Rp. 477.856.434,00**

Beban Barang dan Jasa semester pertama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 477.856.434,00 sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 sebesar Rp. 263.447.380,00. Selisih antara beban barang dan jasa dengan realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2018 sebesar (Rp. 214.409.054,00). Beban Barang dan Jasa semester pertama Tahun 2017 sebesar Rp. 419.315.402,00. Rincian beban barang dan jasa sebagai berikut:

Tabel 5.9.

Rincian Beban Barang dan Jasa Semester Pertama TA 2018

(dalam rupiah)

URAIAN	Semester Pertama Tahun 2018		Selisih	Saldo Semester Pertama Tahun 2017
	Beban	Realisasi Belanja		
Beban Barang dan Jasa				
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	78.125.250,00	41.946.350,00	36.178.900,00	7.688.200,00
Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.950.000,00	1.950.000,00	-	-
Beban Dokumentasi	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
Beban Bahan Dekorasi	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
Beban Jasa Telepon	23.567.280,00	19.677.262,00	3.890.018,00	(1.071.313,00)
Beban Jasa Kawat/ Faksimili/ Internet	106.470.000,00	53.235.000,00	53.235.000,00	48.000.000,00
Beban Jasa Paket/ Pengiriman	300.000,00	300.000,00	-	-
Beban Jasa Service Peralatan/ Perlengkapan Kantor	1.975.000,00	1.750.000,00	225.000,00	-
Beban Cetak	2.105.000,00	2.105.000,00	-	-
Beban Penggandaan	20.020.750,00	14.475.000,00	5.545.750,00	3.375.000,00
Beban Penjilidan	3.035.000,00	2.605.000,00	430.000,00	300.000,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	7.885.000,00	6.170.000,00	1.715.000,00	-
Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.454.204,00	12.655.918,00	23.798.286,00	95.125.000,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	137.018.950,00	106.577.850,00	30.441.100,00	-
Beban Bimbingan Teknis	6.450.000,00	-	6.450.000,00	-
JUMLAH	477.856.434,00	263.447.380,00	214.409.054,00	153.416.887,00

a. **Beban Persediaan Alat Tulis Kantor** **Rp. 78.125.250,00**

Beban Persediaan Alat Tulis Kantor semester pertama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 78.125.250,00 lebih besar apabila dibandingkan dengan realisasi Belanjanya yaitu sebesar Rp. 41.946.350,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 36.178.900,00 yang merupakan belanja yang belum direalisasikan pembayarannya.

Saldo semester pertama Tahun 2017 untuk Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 78.125.250,00.

b. Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Rp. 78.125.250,00

Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya semester pertama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.950.000,00 sama dengan realisasi Belanjanya yaitu sebesar Rp. 1.950.000,00. Saldo semester pertama Tahun 2017 untuk Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya sebesar Rp. 0,00.

c. Beban Dokumentasi Rp. 1.500.000,00

Beban Dokumentasi semester pertama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.500.000,00 lebih besar apabila dibandingkan dengan realisasi belanjanya yaitu sebesar Rp. 0,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.500.000,00 yang merupakan belanja yang belum direalisasikan pembayarannya. Saldo semester pertama Tahun 2017 untuk Dokumentasi sebesar Rp. 0,00.

d. Beban Bahan Dekorasi Rp. 1.000.000,00

Beban Bahan Dekorasi semester pertama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.000.000,00 lebih besar apabila dibandingkan dengan realisasi belanjanya yaitu sebesar Rp. 0,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.000.000,00 yang merupakan belanja yang belum direalisasikan pembayarannya. Saldo semester pertama Tahun 2017 untuk Bahan Dekorasi sebesar Rp. 0,00.

e. Beban Jasa Telepon Rp. 23.567.280,00

Beban Jasa Telepon semester pertama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 23.567.280,00 lebih besar apabila dibandingkan dengan realisasi belanjanya yaitu sebesar Rp. 19.677.262,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 3.890.018,00 yang merupakan belanja yang belum direalisasikan pembayarannya. Saldo semester pertama Tahun 2017 untuk Jasa Telepon sebesar (Rp. 1.071.313,00).

f. Beban Jasa Kawat/ Faksimili/Internet Rp. 106.470.000,00

Beban Jasa Kawat/ Faksimili/Internet semester pertama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 106.470.000,00 lebih besar apabila dibandingkan dengan realisasi belanjanya yaitu sebesar Rp. 53.235.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 53.235.000,00 yang merupakan belanja yang belum direalisasikan pembayarannya. Saldo semester pertama Tahun 2017 untuk Jasa Kawat/ Faksimili/Internet sebesar Rp. 48.000.000,00.

- g. Beban Jasa Paket/ Pengiriman Rp. 300.000,00**
Beban Jasa Paket/Pengiriman semester pertama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 300.000,00 sama dengan realisasi Belanjanya yaitu sebesar Rp. 300.000,00. Saldo semester pertama Tahun 2017 untuk Jasa Paket/Pengiriman sebesar Rp. 0,00.
- h. Beban Jasa Service Peralatan/ Perlengkapan Kantor Rp. 1.975.000,00**
Beban Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor semester pertama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.975.000,00 lebih besar apabila dibandingkan dengan realisasi belanjanya yaitu sebesar Rp. 1.750.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 225.000,00 yang merupakan belanja yang belum direalisasikan pembayarannya. Saldo semester pertama Tahun 2017 untuk Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 0,00.
- i. Beban Cetak Rp. 2.105.000,00**
Beban Cetak semester pertama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.105.000,00 sama dengan realisasi Belanjanya yaitu sebesar Rp. 2.105.000,00. Saldo semester pertama Tahun 2017 untuk Cetak sebesar Rp. 0,00.
- j. Beban Penggandaan Rp. 20.020.750,00**
Beban Penggandaan semester pertama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 20.020.750,00 lebih besar apabila dibandingkan dengan realisasi belanjanya yaitu sebesar Rp. 14.475.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 5.545.750,00 yang merupakan belanja yang belum direalisasikan pembayarannya. Saldo semester pertama Tahun 2017 untuk Penggandaan sebesar Rp. 3.375.000,00.
- k. Beban Penjilidan Rp. 3.035.000,00**
Beban Penjilidan semester pertama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3.035.000,00 lebih besar apabila dibandingkan dengan realisasi belanjanya yaitu sebesar Rp. 2.605.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 430.000,00 yang merupakan belanja yang belum direalisasikan pembayarannya. Saldo semester pertama Tahun 2017 untuk Penggandaan sebesar Rp. 300.000,00.
- l. Beban Makanan dan Minuman Rapat Rp. 7.885.000,00**
Beban Makanan dan Minuman Rapat semester pertama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 7.885.000,00 lebih besar apabila dibandingkan dengan realisasi belanjanya yaitu sebesar Rp. 6.170.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.715.000,00 yang merupakan belanja yang belum direalisasikan pembayarannya.

Saldo semester pertama Tahun 2017 untuk Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 0,00.

m. Beban Makanan dan Minuman Pelatihan Rp. 50.000.000,00

Beban Makanan dan Minuman Pelatihan semester pertama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 50.000.000,00 lebih besar apabila dibandingkan dengan realisasi belanjanya yaitu sebesar Rp. 0,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 50.000.000,00 yang merupakan belanja yang belum direalisasikan pembayarannya. Saldo semester pertama Tahun 2017 untuk Makanan dan Minuman Pelatihan sebesar Rp. 0,00.

n. Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 36.454.204,00

Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah semester pertama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 36.454.204,00 lebih besar apabila dibandingkan dengan realisasi belanjanya yaitu sebesar Rp. 12.655.918,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 23.798.286,00 yang merupakan belanja yang belum direalisasikan pembayarannya. Saldo semester pertama Tahun 2017 untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 95.125.000,00.

o. Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 137.018.950,00

Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah semester pertama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 137.018.950,00 lebih besar apabila dibandingkan dengan realisasi belanjanya yaitu sebesar Rp. 106.577.850,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 30.441.100,00 yang merupakan belanja yang belum direalisasikan pembayarannya. Saldo semester pertama Tahun 2017 untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 0,00.

p. Beban Bimbingan Teknis Rp. 6.450.000,00

Beban Bimbingan Teknis semester pertama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 6.450.000,00 lebih besar apabila dibandingkan dengan realisasi belanjanya yaitu sebesar Rp. 0,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 6.450.000,00 yang merupakan belanja yang belum direalisasikan pembayarannya. Saldo semester pertama Tahun 2017 untuk Bimbingan Teknis sebesar Rp. 0,00.

3. Beban Penyusutan dan Amortisasi **Rp. 247.745.175,00**

Beban Penyusutan dan Amortisasi semester pertama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 247.745.175,00 sedangkan semester pertama Tahun 2017 sebesar Rp. 248.133.825,00. Rincian obyek beban penyusutan dan amortisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018		Beban Semester Pertama Tahun 2017
	Beban	Realisasi Belanja	
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	12.359.390,00	-	12.359.390,00
Beban Penyusutan Alat Kantor	26.673.500,00	-	26.673.500,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	17.925.300,00	-	17.925.300,00
Beban Penyusutan Komputer	144.055.310,00	-	153.974.060,00
Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.942.050,00	-	3.890.200,00
Beban Penyusutan Alat Studio	4.917.000,00	-	4.917.000,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	4.105.000,00	-	4.105.000,00
Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	2.979.000,00	-	-
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	31.788.625,00	-	24.289.375,00
Jumlah	247.745.175,00	-	248.133.825,00

4. Beban Lain – Lain **Rp. 0,00**

Beban Lain-Lain semester pertama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,00. Beban lain-lain meliputi pembayaran sanksi administrasi, biaya administrasi, dan biaya lain-lain pajak kendaraan bermotor. Untuk Tahun 2018, Biro Pengadaan Barang/Jasa tidak terdapat Beban Lain-Lain. Beban lain-lain semester pertama Tahun 2017 sebesar Rp. 0,00. Rincian obyek beban lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018		Selisih	Semester Pertama 2017
	Beban	Realisasi Belanja		
Beban Lain - Lain	-	-	-	14.656.145,00
Jumlah	-	-	-	14.656.145,00

5. Beban Transfer

Kelompok beban transfer tidak ada.

6. Beban Kegiatan Non Operasional

Kelompok beban kegiatan non operasional tidak ada.

7. Beban Luar Biasa

Kelompok beban luar biasa tidak ada.

V.1.5. ASET

Aset terdiri atas :

1. ASET LANCAR

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari:

a) Kas Bendahara Penerimaan

Saldo kas di bendahara penerimaan per 30 Juni 2018 dan per 30 Juni 2017 sebesar Rp0,00.

b) Kas Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di bendahara pengeluaran per 30 Juni 2018 sebesar Rp. 4.227.446,00, dengan rincian saldo kas tunai Rp. 4.227.446,00 dan saldo kas bank Rp. 0,00. Saldo kas di bendahara pengeluaran merupakan UP Tahun 2018. Saldo kas di bendahara pengeluaran per 30 Juni 2017 sebesar Rp. 17.821.800,00.

c) Investasi Jangka Pendek

Saldo investasi jangka pendek per 30 Juni 2018 dan per 30 Juni 2017 Rp. 0,00.

d) Piutang Pendapatan

Saldo piutang pendapatan per 30 Juni 2018 dan per 30 Juni 2017 Rp. 0,00.

e) Piutang Lainnya

Saldo piutang lainnya per 30 Juni 2018 dan per 30 Juni 2017 Rp. 0,00.

f) Penyisihan Piutang

Saldo penyisihan piutang per 30 Juni 2018 dan per 30 Juni 2017 Rp. 0,00.

g) Beban Dibayar Dimuka

Saldo beban dibayar dimuka per 30 Juni 2018 dan per 30 Juni 2017 Rp. 0,00.

h) Persediaan

Saldo persediaan barang pakai habis per 30 Juni 2018 sebesar Rp. 0,00 sedangkan saldo per 30 Juni 2017 sebesar Rp. 0,00. Rincian persediaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

NO.	REKENING	URAIAN	SALDO AWAL (Jumlah Per 31 Desember 2017)	PERSEDIAN		SALDO AKHIR 2018
				PENERIMAAN	PENGELUARAN	
1	5.2.2.01	Belanja Barang Pakai Habis		43.896.350,00	43.896.350,00	
	5.2.2.01.01	1 Persediaan Alat Tulis Kantor		41.946.350,00	41.946.350,00	-
	5.2.2.01.03	2 Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	-			-
	5.2.2.01.04	3 Persediaan Perangko, Material, Benda Pos Lainnya		1.950.000,00	1.950.000,00	-
	5.2.2.01.05	4 Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				
	5.2.2.01.06	5 Persediaan Bahan Bakar Minyak /Gas	-			-
	5.2.2.01.07	6 Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	-			-
	5.2.2.01.08	7 Persediaan Isi Tabung Gas	-			-
	5.2.2.01.99	8 Persediaan Bahan Pakai Habis Lainnya	-			-
2	5.2.2.02	Belanja Bahan / Material		-	-	
	5.2.2.02.01	1 Persediaan Bahan Baku Bangunan	-			-
	5.2.2.02.02	2 Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	-			-
	5.2.2.02.03	3 Persediaan Bibit Ternak	-	-	-	-
	5.2.2.02.04	4 Persediaan Bahan Obat-obatan	-	-	-	-
	5.2.2.02.05	5 Persediaan Bahan Kimia	-	-	-	-
	5.2.2.02.06	6 Persediaan Makanan Pokok	-	-	-	-
	5.2.2.02.07	7 Persediaan Bahan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-
	5.2.2.02.08	8 Persediaan Bahan Perlengkapan Laboratorium	-	-	-	-
	5.2.2.02.09	9 Persediaan Bahan Penelitian	-	-	-	-
3	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
	5.2.2.05.02	1 Persediaan Penggantian Suku Cadang	-	-	-	-
	5.2.2.05.03	2 Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	-			-
4	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan		2.105.000,00	2.105.000,00	
	5.2.2.06.01	1 Persediaan Cetak	-	2.105.000,00	2.105.000,00	-
	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman		6.170.000,00	6.170.000,00	
	5.2.2.11.01	1 Makanan dan Minuman Harian Pegawai	-	-	-	-
	5.2.2.11.02	2 Makanan dan Minuman Rapat	-	6.170.000,00	6.170.000,00	-
	5.2.2.11.03	3 Makanan dan Minuman Tamu	-	-	-	-
5	5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		-	-	
	5.2.2.23.01	1 Persediaan Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat	-	-	-	-
	5.2.2.23.02	2 Persediaan Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
6	5.2.2.24	Belanja Barang Untuk Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		-	-	
	5.2.2.24.01	1 Persediaan Barang yang Dijual Kepada Masyarakat	-	-	-	-
	5.2.2.24.02	2 Persediaan Barang yang Dijual Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
		JUMLAH	-	52.171.350,00	52.171.350,00	-

2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan salah satu instrumen untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek (3 – 12 bulan) dan investasi jangka panjang (lebih dari 12 bulan).

a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Saldo investasi jangka panjang non permanen per 30 Juni 2018 dan per 30 Juni 2017 Rp. 0,00.

b) Investasi Jangka Panjang Permanen

Saldo investasi jangka panjang permanen per 30 Juni 2018 dan per 30 Juni 2017 Rp. 0,00.

3. ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap per 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp. 617.179.085,00. Sedangkan saldo aset tetap per 30 Juni 2017 sebesar Rp. 1.026.371.928,00. Rincian aset tetap pada Tahun 2018, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.10.

Rincian Aset Tetap Per 30 Juni 2018

(dalam rupiah)

Nama Barang Inventaris	Jumlah s/d Tahun 2017	Pertambahan ASET 2018				MUTASI		Penghapusan s/d 2018	Total Aset	Akumulasi Penyusutan s/d Juni 2018	Total Aset setelah penyusutan
		Biaya Fisik	Biaya Perolehan	Retensi	Jumlah	TAMBAH	KURANG				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Peralatan dan Mesin	2.009.723.921,00	-	-	-	-	-	-	-	2.009.723.921,00	1.392.544.836,00	617.179.085,00
Alat-Alat Berat	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Alat-Alat Angkutan	173.031.461,00	-	-	-	-	-	-	-	173.031.461,00	138.013.189,00	35.018.272,00
Alat Bengkel/Alat Ukur	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Alat Pertanian dan Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.716.682.460,00	-	-	-	-	-	-	-	1.716.682.460,00	1.200.861.980,00	515.820.480,00
Alat Studio dan Alat Komunikasi	90.220.000,00	-	-	-	-	-	-	-	90.220.000,00	49.697.667,00	40.522.333,00
Alat-Alat Kedokteran	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Alat Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Alat Keamanan	29.790.000,00	-	-	-	-	-	-	-	29.790.000,00	3.972.000,00	25.818.000,00
Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bangunan Gedung	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bangunan Monumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Jalan, Irigasi dan Instalasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Jalan dan Jembatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bangunan Air (Irigasi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Instalasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Buku dan Perpustakaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Barang Bercorak Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Hewan/ternak dan Tumbuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bangunan Gedung	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bangunan Monumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Jalan dan Jembatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bangunan Air (Irigasi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Instalasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Jumlah I	2.009.723.921,00	-	-	-	-	-	-	-	2.009.723.921,00	1.392.544.836,00	617.179.085,00

a) Peralatan dan mesin Rp. 2.009.723.921,00

Peralatan dan Mesin yang dimiliki Biro Pengadaan Barang/Jasa per 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp. 2.009.723.921,00 sedangkan per 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp. 2.009.723.921,00. Saldo peralatan dan mesin per 30 Juni 2017 sebesar Rp. 1.979.933.921,00. Mutasi peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	30 Juni 2018
Saldo Awal Per 01 Januari 2018 (a)	Rp 2.009.723.921,00
Penambahan:	
- Pembelian	Rp -
- Transfer Masuk	Rp -
- Koreksi Nilai (kapitalisasi nilai perolehan (MAK 52))	Rp -
- Pengembangan	Rp -
- Reklasifikasi Masuk	Rp -
- Pengalihan (masuk)	Rp -
Jumlah (b)	Rp -
Pengurangan:	
- Transfer Keluar	Rp -
- Reklasifikasi Keluar	Rp -
- Pengalihan (keluar)	Rp -
- Koreksi Nilai	Rp -
Jumlah (c)	Rp -
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp -
Saldo Per 30 Juni 2018 (a+(b-c))	Rp 2.009.723.921,00

Rincian saldo peralatan dan mesin per 30 Juni 2018 sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Awal 01/01/2018	Mutasi		Saldo Akhir 30/06/2018
			Tambah	Kurang	
Peralatan dan mesin					
1.	Alat-Alat Angkutan	173.031.461,00	-	-	173.031.461,00
2.	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.716.682.460,00	-	-	1.716.682.460,00
3.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	90.220.000,00	-	-	90.220.000,00
4.	Alat Keamanan	29.790.000,00	-	-	29.790.000,00
Jumlah		2.009.723.921,00	-	-	2.009.723.921,00

b) Aset Tetap Lainnya Rp0,00

Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Biro Pengadaan Barang/Jasa per 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan per 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp0,00. Saldo aset tetap lainnya per 30 Juni 2017 sebesar Rp0,00. Mutasi aset tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2018
Saldo Awal Per 01 Januari 2018 (a)	Rp -
Penambahan:	
- Pembelian	Rp -
- Transfer Masuk	Rp -
- Koreksi Nilai (kapitalisasi nilai perolehan (MAK 52))	Rp -
- Pengembangan	Rp -
- Reklasifikasi Masuk	Rp -
- Pengalihan (masuk)	Rp -
Jumlah (b)	Rp -
Pengurangan:	
- Transfer Keluar	Rp -
- Reklasifikasi Keluar	Rp -
- Pengalihan (keluar)	Rp -
- Koreksi Nilai	Rp -
Jumlah (c)	Rp -
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp -
Saldo Per 30 Juni 2018 (a+(b-c))	Rp -

c)

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp0,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Biro Pengadaan Barang/Jasa per 30 Juni 2018 sebesar Rp0,00, sedangkan per 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp0,00. Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2017 sebesar Rp0,00.

Mutasi konstruksi dalam pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2018
Saldo Awal Per 01 Januari 2018 (a)	Rp -
Penambahan:	
- Pembelian	Rp -
- Transfer Masuk	Rp -
- Koreksi Nilai (kapitalisasi nilai perolehan (MAK 52))	Rp -
- Pengembangan	Rp -
- Reklasifikasi Masuk	Rp -
- Pengalihan (masuk)	Rp -
Jumlah (b)	Rp -
Pengurangan:	
- Transfer Keluar	Rp -
- Reklasifikasi Keluar	Rp -
- Pengalihan (keluar)	Rp -
- Koreksi Nilai	Rp -
Jumlah (c)	Rp -
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp -
Saldo Per 30 Juni 2018 (a+(b-c))	Rp -

d) Akumulasi Penyusutan **Rp(1.392.544.836,00)**

Akumulasi Penyusutan yang dimiliki Biro Pengadaan Barang/Jasa per 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp(1.392.544.836,00), sedangkan per 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp(1.176.588.286,00). Saldo akumulasi penyusutan per 30 Juni 2017 sebesar Rp(953.561.993,00).

Rincian saldo akumulasi penyusutan per 30 Juni 2018 sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Awal 01/01/2018	Penyusutan		Saldo Akhir 30/06/2018
			Semester I	Semester II	
1.	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Angkutan	(125.653.799,00)	(12.359.390,00)	-	(138.013.189,00)
2.	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(1.009.265.820,00)	(191.596.160,00)	-	(1.200.861.980,00)
3.	Akumulasi Penyusutan Alat Studio dan Alat Komunikasi	(40.675.667,00)	(9.022.000,00)	-	(49.697.667,00)
4.	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan	(993.000,00)	(2.979.000,00)	-	(3.972.000,00)
Jumlah		(1.176.588.286,00)	(215.956.550,00)	-	(1.392.544.836,00)

e) Aset Lainnya **Rp 254.309.000,00**

Aset Lainnya yang dimiliki Biro Pengadaan Barang/Jasa per 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 254.309.000,00, nilai per 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp254.309.000,00 dan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sebesar Rp(122.696.750,00). Rincian aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2018
Saldo Awal Per 01 Januari 2018 (a)	Rp 254.309.000,00
Penambahan:	
- Koreksi hasil audit BPK untuk aset lain-lain	Rp -
Jumlah (b)	Rp -
Pengurangan:	
- Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31 desember 2017	Rp (122.696.750,00)
- Beban amortisasi aset tidak berwujud semester I tahun 2018	Rp (31.788.625,00)
Jumlah (c)	Rp (154.485.375,00)
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp (154.485.375,00)
Saldo Per 30 Juni 2017 (a+(b-c))	Rp 99.823.625,00

V.1.6. KEWAJIBAN

Kewajiban terdiri atas :

1. Kewajiban Jangka Pendek

a) Utang Penghitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo utang penghitungan pihak ketiga (PFK) per 30 Juni 2018 dan per 30 Juni 2017 Rp0,00.

b) Utang Bunga

Saldo utang bunga per 30 Juni 2018 dan per 30 Juni 2017 Rp0,00.

c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo bagian lancar utang jangka panjang per 30 Juni 2018 dan per 30 Juni 2017 Rp0,00.

d) Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo pendapatan diterima dimuka per 30 Juni 2018 dan per 30 Juni 2017 Rp0,00.

e) Utang Beban

Saldo utang beban per 30 Juni 2018 adalah Rp125.239.000,00 dan per 30 Juni 2017 sebesar Rp48.000.000,00. Utang beban per 30 Juni 2018 muncul karena SP2D LS baru keluar di bulan Juli. Rincian utang beban dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	30 Juni 2018	30 Juni 2017
1.	Utang Alat Tulis Kantor	22.004.000,00	-
2.	Utang Kawat/Faximili/Internet	53.235.000,00	48.000.000,00
3.	Utang Makan Minum Pelatihan	50.000.000,00	
Jumlah		125.239.000,00	48.000.000,00

f) Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo utang jangka pendek lainnya per 30 Juni 2018 dan per 30 Juni 2017 Rp0,00.

g) Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Saldo kewajiban untuk dikonsolidasikan per 30 Juni 2018 sebesar Rp0,00 dan per 30 Juni 2017 Rp0,00.

2. Kewajiban Jangka Panjang

a) Utang Dalam Negeri

Saldo utang dalam negeri per 30 Juni 2018 dan per 30 Juni 2017 Rp0,00.

b) Utang Jangka Panjang Lainnya

Saldo utang jangka panjang lainnya per 30 Juni 2018 dan per 30 Juni 2017 Rp0,00.

V.1.7. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih Biro Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Ekuitas akhir Biro Pengadaan Barang/Jasa per 30 Juni 2018 sebesar Rp595.991.156,00 sedangkan per 30 Juni 2017 sebesar Rp964.747.885,00. Perubahan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2018
Ekuitas Awal	Rp 964.747.885,00
Surplus/Defisit-LO	Rp (1.652.222.609,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp -
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp -
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp -
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	Rp 1.283.465.880,00
Saldo Per 30 Juni 2017	Rp 595.991.156,00

Keterangan:

1. Ekuitas awal

(dalam rupiah)					
	Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1.	Ekuitas awal (ekuitas akhir 2017)	964.747.885,00	-	-	964.747.885,00
2.	Surfus/Defisit-LO	-	-	(1.652.222.609,00)	(687.474.724,00)
3.	Kewajiban untuk dikonsolidasikan 2017	-	1.283.465.880,00	-	595.991.156,00
	Jumlah	964.747.885,00	1.283.465.880,00	(1.652.222.609,00)	595.991.156,00

2. Surplus/Defisit – LO

Berasal dari Surplus/Defisit – LO semester I tahun 2018 sebesar Rp(1.652.222.609,00).

3. Koreksi ekuitas

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

VI.1 Pengungkapan penting lainnya

Tidak ada kejadian luar biasa yang signifikan baik bencana alam maupun sosial yang di luar kemampuan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

VI.2 Temuan dan tindak lanjut temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut temuan BPK untuk Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Semester Pertama Tahun 2018.

VI.3 Rekening pemerintah

Bank Pembangunan Kalteng No. Rekening 100-002-000003192-2 a.n Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB VII

P E N U T U P

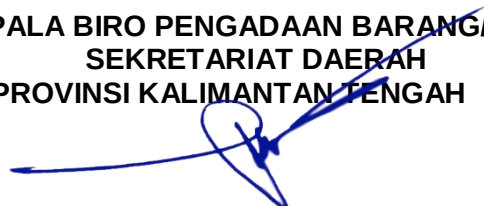
Sebagai penutup Catatan Atas Laporan Keuangan Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Tengah Semester Pertama Tahun Anggaran 2018 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) dengan basis/dasarakrual. Basis kas masih diterapkan untuk Laporan Realisasi Anggaran karena penyusunan anggaran masih menggunakan basis kas.
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para stakeholders dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Tengah Semester Pertama Tahun Anggaran 2018 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 31 Juli 2018

**KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**


**Dr. BENIUS, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650831 199003 1 006**